

## ***Good Governance di Era Digital: Studi Kasus Implementasi E-Government di Indonesia***

**Susniwati<sup>1</sup>, Ardiyansah<sup>2</sup>, Diana Sukorina<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Langlang Buana, Bandung

<sup>2</sup>Program Studi Magister Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Administrasi,  
Universitas Krisnadwipayana, Jakarta

<sup>3</sup>Prodi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Surakarta  
[susniwatisusniwati044@gmail.com](mailto:susniwatisusniwati044@gmail.com), [ardiyansah@unkris.ac.id](mailto:ardiyansah@unkris.ac.id), [diana.sukorina@gmail.com](mailto:diana.sukorina@gmail.com)

*Submitted: 30/12/2024; Revised: 30/01/2025; Published: 31/01/2025*

DOI: <https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i1.277>

---

### **Abstract**

*This study aims to determine and analyze the implementation of Good Governance in the Digital Era: Case Study of E-Government Implementation in Indonesia, and to determine and analyze the Obstacles and Efforts to implement Good Governance in the Digital Era: Case Study of E-Government Implementation in Indonesia. This study is a qualitative descriptive study, namely a study that aims to describe and describe events or phenomena that occur in the field and present data systematically, factually and accurately regarding the facts or phenomena that occur in the field. The results of the study indicate that overall, the implementation of E-Government in Indonesia has had a positive impact on good governance or more transparent, accountable, and efficient governance. However, various challenges or obstacles such as the digital divide, data security, and infrastructure readiness, human resources still need to be overcome so that the goals of Good Governance in the digital era can be achieved optimally and provide real benefits to the community. To overcome obstacles in the implementation of Good Governance in the digital era requires a comprehensive strategy, starting from improving infrastructure, digital literacy, supporting regulations, to strengthening cybersecurity. With the right steps, digital transformation in government can run more effectively, improve the quality of public services, and realize a transparent and accountable government system.*

*Keywords: Good Governance, Digital Era, E-Government Implementation*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan *Good Governance* di Era Digital: Studi Kasus Implementasi *E-Government* di Indonesia, dan untuk mengetahui dan menganalisis Hambatan dan Upaya pelaksanaan *Good Governance* di Era Digital: Studi Kasus Implementasi *E-Government* di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan dan menyajikan data secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara keseluruhan, implementasi *E-Government* di Indonesia telah memberikan dampak positif terhadap good governance atau tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Namun, berbagai tantangan atau hambatan seperti kesenjangan digital, keamanan

data, serta kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia masih perlu diatasi agar tujuan *Good Governance* di era digital dapat tercapai secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Untuk mengatasi hambatan dalam penerapan *Good Governance* di era digital memerlukan strategi yang komprehensif, mulai dari peningkatan infrastruktur, literasi digital, regulasi yang mendukung, hingga penguatan keamanan siber. Dengan langkah-langkah yang tepat, transformasi digital dalam pemerintahan dapat berjalan lebih efektif, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mewujudkan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Kata Kunci: *Good Governance*, Era Digital, Implementasi *E-Government*

## Pendahuluan

Dalam era digital, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk tata kelola pemerintahan (*governance*). Sejalan dengan pendapat Ilyas dan Hartono (2023) menyatakan bahwa era digital ditandai dengan akses informasi yang cepat dan mudah, serta perkembangan teknologi yang membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Sedangkan menurut Nisya Nur Rahma (2021), era digital adalah suatu kondisi kehidupan di mana semua kegiatan yang mendukung kehidupan telah dipermudah dengan adanya teknologi. Pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, terus berupaya meningkatkan kualitas layanan publik dengan mengadopsi teknologi digital melalui konsep *e-government*. Digitalisasi dalam pemerintahan bertujuan untuk mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Konsep *good governance* sendiri menekankan pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang mencerminkan pemerintahan yang terbuka, responsif, serta berorientasi pada pelayanan publik. Menurut United Nations Development Programme (UNDP, 1997) mendefinisikan *good governance* sebagai hubungan sinergis dan konstruktif antara negara, sektor swasta, dan masyarakat. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 Pasal 2d, *good governance* berarti pemerintahan yang baik yang menerapkan dan mengembangkan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat

Dalam konteks Indonesia, penerapan *e-government* diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan birokrasi yang masih diwarnai oleh inefisiensi, keterbatasan akses

informasi, serta potensi penyalahgunaan wewenang. Dengan adanya digitalisasi dalam pemerintahan, proses administrasi menjadi lebih cepat, layanan publik lebih mudah diakses, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kebijakan semakin meningkat. Pemerintah Indonesia telah menginisiasi berbagai kebijakan dan program berbasis digital untuk mendukung penerapan *good governance*, seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), e-KTP, layanan SIM online, e-Procurement, serta berbagai platform layanan publik digital lainnya, seperti tertera pada

**Tabel 1**  
**Penerapan *Good Governance* melalui berbagai Inisiatif E-Government di Indonesia**

<b>Program/Inisiatif</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Manfaat</b>	<b>Tantangan</b>
<b>Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</b>	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi layanan dan administrasi.	-Integrasi layanan pemerintahan secara digital. -Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. -Mengurangi birokrasi manual yang lambat.	- Kesiapan infrastruktur dan SDM. - Keamanan data dan perlindungan privasi. - Resistensi terhadap perubahan dari aparatur negara.
<b>E-KTP</b>	Mewujudkan identitas tunggal bagi warga negara untuk berbagai keperluan administrasi.	-Mengurangi pemalsuan identitas. -Mempermudah akses layanan publik. -Meningkatkan efektivitas	-Gangguan teknis dalam penerbitan. -Keterbatasan fasilitas di daerah terpencil. -Masalah kebocoran dan

Program/Inisiatif	Tujuan	Manfaat	Tantangan
		administrasi kependudukan.	perlindungan data pribadi.
<b>Layanan Online</b> <b>SIM</b>	Mempermudah proses pembuatan dan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM).	- Mengurangi antrean di kantor polisi. - Mempercepat proses administrasi. - Mengurangi potensi pungutan liar.	- Keterbatasan akses internet di beberapa daerah. - Kurangnya literasi digital bagi masyarakat tertentu.
<b>E-Procurement</b>	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.	- Mencegah korupsi dalam pengadaan. - Mempercepat proses lelang dan tender. - Menghemat anggaran negara.	- Kurangnya kesiapan teknis di daerah tertentu. - Kemungkinan manipulasi data dalam sistem. - Tantangan dalam penyesuaian regulasi.

Sumber: Laporan Koordinasi Bappenas, 2020

Berdasarkan tabel diatas menggambarkan bagaimana penerapan teknologi dalam pemerintahan tidak hanya meningkatkan transparansi dan efisiensi, tetapi juga menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai *good governance* secara optimal. Implementasi *e-government* di Indonesia masih menghadapi sejumlah

tantangan, antara lain kesenjangan digital, kesiapan sumber daya manusia, keterbatasan infrastruktur serta aspek keamanan data dan privasi, termasuk, rendahnya literasi digital di beberapa daerah. Good Governance merupakan prinsip tata kelola pemerintahan yang menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi. Seiring perkembangan teknologi informasi, pemerintah mulai mengadopsi *E-Government* sejalan dengan pendapat Heeks (2003) dan Bertot, Jaeger, and Grimes (2010) sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung prinsip Good Governance.

Di Indonesia, transformasi digital dalam administrasi negara telah diatur melalui berbagai kebijakan, seperti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Namun, implementasi E-Government masih menghadapi berbagai tantangan, Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan membahas bagaimana implementasi *e-government* di Indonesia telah berkontribusi terhadap peningkatan *good governance*, dengan menyoroti keberhasilan, tantangan, serta dampak yang ditimbulkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui studi kasus ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas digitalisasi pemerintahan dalam membangun pemerintahan yang lebih baik dan berorientasi pada pelayanan publik.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk mengeksplorasi dan menjelaskan suatu fenomena secara mendalam dan deskriptif untuk kemudian dilakukan analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data dari masyarakat, pegawai pemerintahan dan pihak swasta. Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan metode *purposive sampling*, yakni menggunakan beberapa pertimbangan tertentu supaya memperoleh data yang bisa dipertanggungjawabkan. Langkah-langkah dalam analisis data adalah melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## Hasil dan Pembahasan

### Era digital

Era informasi memberikan ruang lingkup yang sangat besar untuk mengorganisasikan kegiatan pemerintah melalui cara-cara baru yang inovatif, transparan yang lebih baik serta memberikan kenyamanan kepada publik dengan jalan memberikan pelayanan kepada publik yang terintegrasi, intraktif dan imajinatif. Konsep E-Government berkembang di atas kecendrungan keinginan masyarakat untuk dapat bebas memilih bilamana dan dimana mereka ingin berhubungan dengan pemerintahnya, serta bebas memilih berbagai akses yang sifatnya tradisional maupun moderen yang mungkin mereka berinteraksi selama 24 (dua puluh empat) jam dan 7 (tujuh) hari dalam seminggu. Kemajuan teknologi informasi memang telah berubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, merevolusi cara hidup masyarakat kian bergeser dari masyarakat industri kepada masyarakat yang berbasis pengetahuan.

### *Good Governance*

*Good Governance* atau pemerintahan yang baik merujuk pada tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik. Konsep ini melibatkan penggunaan prinsip-prinsip tertentu untuk memastikan bahwa kekuasaan dan sumber daya negara digunakan dengan cara yang sah, adil, dan bertanggung jawab. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan keadilan melalui proses pemerintahan yang terbuka dan partisipatif. Ketika pemerintah telah berkomitmen mengembangkan *good governance* atau ketata pemerintahan yang baik, maka pelayanan publik menjadi salah satu titik strategis yang harus mendapat perhatian khusus. Menurut Agus Dwiyanto, (2005) terdapat beberapa pertimbangan terkait hal tersebut :

- 1) Pelayanan publik adalah ranah dimana negara berinteraksi secara intensif dengan warganya;
- 2) Pelayanan publik merupakan ranah dimana berbagai aspek *good governance* dapat diartikulasikan secara relatif lebih mudah;
- 3) Pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur ketata pemerintahan

## Implementasi E-Government di Indonesia

Implementasi *E-Government* di era digital dalam rangka mewujudkan good governance menekankan pentingnya beberapa aspek kunci seperti :

### 1. Akuntabilitas

- Penggunaan teknologi digital dalam administrasi publik mengurangi celah untuk tindakan korupsi dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam penggunaan anggaran dan pelayanan publik
- Kemudahan dalam mengakses layanan pengaduan elektronik memperkuat kontrol sosial masyarakat terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah, meningkatkan akuntabilitas secara keseluruhan

### 2. Transparansi

- Masyarakat maupun pemerintah atau pihak swasta bisa mengakses melalui website resmi yang lebih transparan."
- Dengan Transparansi informasi yang lebih terbuka membuat masyarakat lebih mudah mengawasi kinerja pemerintah, sehingga dengan pengelolaan anggaran dan kebijakan publik, dan proses administrasi pemerintahan dengan lebih mudah.

### 3. Kesiapan Infrastruktur

Kesiapan infrastruktur perlu diperhatikan antara lain :

- Beberapa daerah mengungkapkan bahwa meskipun infrastruktur jaringan di kota besar sudah memadai, di daerah pedalaman masih terdapat keterbatasan jaringan internet dan perangkat yang mendukung operasional *E-Government*. sehingga aplikasi untuk mengakses layanan publik tidak bisa digunakan dengan baik
- Kesiapan infrastruktur tidak hanya bergantung pada perangkat keras dan jaringan, tetapi juga pada kesiapan SDM dalam mengoperasikan teknologi tersebut.

### 4. Sumber Daya Manusia (SDM),

- Ketersediaan SDM dalam implementasi *E-Government* efektif di era digital belum memadai dikarenakan masih banyak SDM belum mampu menggunakan aplikasi

- Pemerintah sudah berusaha melakukan pelatihan dasar bagi pegawai yang ada , berkembangnya teknologi, pelatihan lanjutan sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan potensi sistem yang ada
5. Keamanan data
- Masyarakat yang melek teknologi mengungkapkan bahwa mereka merasa lebih aman dengan penggunaan aplikasi resmi pemerintah yang sudah dilengkapi dengan autentikasi dua faktor dan fitur keamanan lainnya. Namun, ada kekhawatiran terkait kebocoran data pribadi yang sering muncul di berita
  - pemerintah menyatakan bahwa meskipun sistem keamanan sudah ada, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan data pribadi. "Kami sudah memiliki sistem yang aman, tetapi terus menerus memperbarui dan meningkatkan sistem keamanan adalah hal yang sangat penting untuk melindungi data masyarakat,"
6. Penerimaan Masyarakat
- Sebagian besar masyarakat menyadari adanya layanan *E-Government*, terutama layanan administrasi publik seperti e-KTP, layanan SIM online, dan e-Procurement. Namun, tingkat pemahaman terhadap cara penggunaannya masih beragam.
  - Pegawai pemerintah mengungkapkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap layanan digital sudah meningkat, tetapi masih ada kendala dalam pemanfaatannya. Ada kelompok masyarakat yang masih enggan beralih ke layanan digital karena terbiasa dengan sistem manual.

## **Hambatan dalam Penerapan Good Governance di Era Digital**

### **1. Kesenjangan Infrastruktur Digital**

- Tidak semua wilayah, terutama daerah terpencil dan pedesaan, memiliki akses internet yang stabil dan memadai.
- Ketersediaan perangkat teknologi dan jaringan yang belum merata menyebabkan kesulitan dalam menerapkan layanan digital pemerintahan.

## 2. Kurangnya Literasi Digital

- Aparatur pemerintah dan masyarakat masih memiliki keterbatasan dalam memahami dan menggunakan teknologi digital dengan baik.
- Kurangnya pelatihan dan sosialisasi tentang pemanfaatan teknologi dalam tata kelola pemerintahan.

## 3. Resistensi terhadap Perubahan

- Banyak pegawai pemerintahan masih terbiasa dengan sistem manual dan birokrasi konvensional, sehingga kurang menerima digitalisasi.
- Adanya ketakutan akan perubahan tata kerja, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam sistem digital.

## 4. Ketidaksiapan Regulasi dan Kebijakan

- Beberapa peraturan mengenai tata kelola digital masih tumpang tindih dan belum terintegrasi dengan baik antara pemerintah pusat dan daerah.
- Tidak adanya standar baku dalam penerapan teknologi informasi di sektor pemerintahan, yang menyebabkan inkonsistensi dalam implementasi.

## 5. Ancaman Keamanan Siber dan Privasi Data

- Serangan siber seperti peretasan (*hacking*), kebocoran data, dan penyalahgunaan informasi menjadi ancaman serius dalam digitalisasi pemerintahan.
- Kurangnya sistem keamanan yang kuat dalam melindungi data pribadi masyarakat dan dokumen pemerintahan.

## 6. Ketimpangan Anggaran dan Sumber Daya

- Penerapan teknologi digital membutuhkan investasi besar, sementara tidak semua daerah memiliki anggaran yang cukup untuk mendukung transformasi digital.
- Kurangnya SDM yang terampil dalam pengelolaan teknologi digital di sektor pemerintahan.

## 7. Kurangnya Koordinasi Antarlembaga Pemerintahan

- Kurangnya sinkronisasi kebijakan dan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan instansi terkait menyebabkan implementasi sistem digital tidak berjalan efektif.

- Sistem yang tidak terintegrasi menyebabkan duplikasi data dan ketidakefisienan dalam pelayanan publik.

#### 8. Rendahnya Partisipasi Publik dalam Digitalisasi Pemerintahan

- Tidak semua masyarakat memiliki akses atau keterampilan untuk memanfaatkan layanan digital pemerintahan.
- Minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi sistem digital yang diterapkan oleh pemerintah

### **Upaya yang dilakukan dalam mengatasi Hambatan dalam Penerapan Good Governance di Era Digital**

#### 1. Peningkatan Infrastruktur Digital

- Pemerataan Akses Internet

- Membangun dan memperluas jaringan internet ke wilayah pedesaan dan daerah terpencil.
- Meningkatkan kapasitas jaringan serta memastikan akses internet yang stabil dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.

- Modernisasi Teknologi Pemerintahan

- Mengembangkan platform digital yang efisien dan mudah diakses untuk layanan publik.
- Menerapkan sistem teknologi berbasis *cloud computing* dan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence, AI*) dalam pemerintahan.

#### 2. Meningkatkan Literasi Digital bagi Aparatur dan Masyarakat

- Pelatihan dan Pengembangan SDM

- Mengadakan pelatihan dan sertifikasi bagi aparatur sipil negara (ASN) dalam pengelolaan layanan digital.
- Meningkatkan keterampilan teknis pegawai pemerintah dalam penggunaan teknologi digital.

- Sosialisasi kepada Masyarakat

- Mengedukasi masyarakat tentang penggunaan layanan digital pemerintahan, seperti e-KTP, e-Procurement, dan layanan SIM online.

- Mendorong kesadaran publik tentang pentingnya keamanan data pribadi dalam era digital.
3. Membangun Budaya Digital dalam Pemerintahan
- Mendorong Adaptasi Pegawai terhadap Digitalisasi
    - Membangun budaya kerja berbasis digital dengan insentif bagi pegawai yang berinovasi dalam layanan berbasis teknologi.
    - Menerapkan kebijakan penggunaan teknologi dalam proses administrasi pemerintahan.
  - Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas
    - Menerapkan sistem digital yang dapat diakses oleh masyarakat untuk mengawasi kebijakan dan pengelolaan anggaran.
    - Mengembangkan portal keterbukaan informasi publik berbasis real-time.
4. Penyusunan Regulasi dan Kebijakan yang Mendukung Digitalisasi
- Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah
    - Menyusun regulasi yang mengatur tata kelola pemerintahan digital secara nasional dan terintegrasi dengan kebijakan daerah.
    - Memastikan kebijakan digitalisasi pemerintahan selaras dengan prinsip *Good Governance*.
  - Standarisasi Sistem Digital Pemerintahan
    - Menerapkan standar nasional dalam penggunaan teknologi di berbagai instansi pemerintahan.
    - Mengembangkan *Government Cloud* untuk integrasi data antarinstansi.
5. Penguatan Keamanan Siber dan Perlindungan Data
- Meningkatkan Sistem Keamanan Digital
    - Mengadopsi teknologi keamanan data seperti enkripsi, *firewall*, dan sistem deteksi ancaman siber.
    - Mengembangkan sistem cadangan (*backup*) untuk mengantisipasi kehilangan data akibat serangan siber.
  - Membentuk Lembaga Pengawas Keamanan Siber
-

- Memperkuat peran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam melindungi data pemerintahan dan masyarakat.
- Mengimplementasikan regulasi terkait keamanan data dan perlindungan privasi masyarakat.

#### 6. Optimalisasi Anggaran dan Investasi dalam Digitalisasi

- Alokasi Anggaran yang Memadai
  - Menyediakan dana khusus untuk pembangunan infrastruktur digital dan pengadaan teknologi dalam pemerintahan.
  - Mengoptimalkan penggunaan anggaran dengan investasi dalam sistem digital yang berkelanjutan.
- Kerja Sama dengan Pihak Swasta dan Akademisi
  - Menggandeng perusahaan teknologi dalam mengembangkan solusi e-government yang efisien.
  - Melibatkan akademisi dan peneliti dalam inovasi kebijakan digital berbasis riset.

#### 7. Peningkatan Partisipasi Publik dalam Digitalisasi Pemerintahan

- Membangun Platform Pengaduan Masyarakat Digital
  - Mengembangkan aplikasi dan portal resmi untuk menampung aspirasi, keluhan, dan pengaduan masyarakat.
  - Memastikan pemerintah merespons masukan publik secara transparan dan cepat.
- Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang Good Governance Digital
  - Mengadakan seminar, webinar, dan kampanye publik tentang manfaat *Good Governance* berbasis digital.
  - Melibatkan komunitas digital dalam mendukung inovasi layanan publik.

### Kesimpulan

Penelitian ini membahas implementasi *E-Government* dalam rangka mewujudkan *Good Governance* di era digital di Indonesia. Berdasarkan analisis dan temuan yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa penerapan *E-Government* berkontribusi signifikan

terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta partisipasi publik dalam pemerintahan, antara lain :

Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas. Implementasi *E-Government* memungkinkan akses informasi yang lebih terbuka dan mudah bagi masyarakat, sehingga mencegah praktik korupsi serta meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah. Sistem seperti *e-Procurement* dan layanan administrasi publik berbasis digital telah mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.

Efisiensi dan Kualitas Layanan Publik. Penggunaan teknologi dalam pelayanan publik, seperti e-KTP, layanan SIM online, dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), telah mempercepat proses administrasi, mengurangi birokrasi yang berbelit, serta meningkatkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.

Kesiapan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia. Meskipun digitalisasi pemerintahan terus berkembang, masih terdapat kendala dalam pemerataan infrastruktur digital, terutama di daerah terpencil. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia, baik dari segi masyarakat maupun aparatur pemerintah, masih perlu ditingkatkan melalui edukasi dan pelatihan teknologi.

Keamanan Data dan Kepercayaan Publik. Salah satu tantangan utama dalam implementasi *E-Government* adalah kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan data pribadi. Oleh karena itu, peningkatan sistem keamanan siber serta regulasi yang jelas terkait perlindungan data menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah.

Penerimaan Masyarakat terhadap E-Government. Tingkat penerimaan masyarakat terhadap layanan digital sangat bergantung pada pemahaman, kemudahan akses, dan manfaat yang dirasakan. Meskipun sebagian besar masyarakat perkotaan sudah mulai terbiasa dengan layanan digital, masih banyak masyarakat di daerah yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan karena keterbatasan infrastruktur dan literasi digital

Namun, berbagai tantangan atau hambatan seperti kesenjangan digital, keamanan data, serta kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, Kurangnya Literasi Digital, Resistensi terhadap Perubahan, Ancaman Keamanan Siber dan Privasi Data, dan lain

sebagainya, masih perlu diatasi agar tujuan *Good Governance* di era digital dapat tercapai secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Untuk mengatasi hambatan dalam penerapan *Good Governance* di era digital memerlukan strategi yang komprehensif, mulai dari peningkatan infrastruktur, literasi digital, regulasi yang mendukung, hingga penguatan keamanan siber, Penyusunan Regulasi dan Kebijakan yang Mendukung Digitalisasi, serta. Peningkatan Partisipasi Publik dalam Digitalisasi Pemerintahan Dengan langkah-langkah yang tepat.

## Daftar Pustaka

- Agus Dwiyanto, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005). hlm. 10
- Bertot, Jaeger, dan Grimes (2010) dalam buku *"The State of E-Government Research: A Review and Analysis"* Penerbit Springer
- Davis dan Deil-Amen (2013) dalam bukunya *"The Digital Revolution and Higher Education"* Penerbit: Palgrave Macmillan
- George C. Edward III ( 1980) “ *Implementing Public Policy*” Penerbit: Congressional Quarterly Press
- Heeks (2003) *"E-Government for Development: A Guide for Development Professionals"* Penerbit: Cambridge University Press
- Ilyas dan Hartono (2023) "Digitalisasi UMKM dan Pertumbuhan Ekonomi" Penerbit, Shiddiq Press
- Mahendradi, M., & Ardiyansah, A. (2022). Pemanfaatan E-Government Berbasis Website Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan Perizinan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpstp) Kota Semarang). *Gema Publica*, 7(1), 197-211.
- Manuel Castells (2000) *"The Rise of the Network Society"* Penerbit: Blackwell Publishers
- Marc Prensky (2001) dalam artikelnya *"Digital Natives, Digital Immigrants"*, Penerbit: *On the Horizon* (Vol. 9, Issue 5)
- Merilee S. Grindle (2004) *"Good Governance: The Inflation of an Idea"* Penerbit: *Development Policy Review*
-

Mukhtar (2013), *"Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif"*, Penerbit Referensi (GP Press Group)

Nisya Nur Rahma (2021) artikelnya "Perkembangan Era Digital Serta Dampaknya Bagi Masyarakat" Penerbit Platform Kompasiana

Richardus Eko Indrajit (2016), *Electronic Government: Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital* Penerbit Yogyakarta: ANDI,

Sugiyono (2016), *"Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D"*, Penerbit Alfabeta

UNDP (1997) "*Governance for Sustainable Human Development*" Penerbit: United Nations Development Programme (UNDP)

World Bank (1992) dalam laporannya yang berjudul *"Governance and Development"* Penerbit: World Bank

Dokumen

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tanggal 30 April 2008 tentang Keterbukaan Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 9 Juni 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government

Perda No. 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Keterbukaan Informasi Publik